



## Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat

Bustanuddin<sup>1</sup>, Ahmad Yamin<sup>2</sup>, Zulkieflimansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [bustanuddinnden@gmail.com](mailto:bustanuddinnden@gmail.com), [zulkieflimansyah@uts.ac.id](mailto:zulkieflimansyah@uts.ac.id), [ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-04  <b>Keywords:</b> <i>Information Systems; Financial Management Flexibility.</i>	<p>By implementing the Regional Government Information System (SIPD) in accordance with what has been regulated in Government Regulation Number 12 of 2019 in conjunction with Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 by all regional apparatus, it will certainly affect the flexibility that has been regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 79 2018 for Regional Public Service Agencies, especially in the Health Sector. The aim of this research is to analyze the influence of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on the flexibility of financial management patterns of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) at the ASY SYIFA Hospital, West Sumbawa Regency. Method In this research, researchers used a mixed method, namely a method that combines qualitative and quantitative approaches. There were 20 respondents in this study using non-probability sampling techniques. Data analysis model using simple linear regression. The data obtained was processed and analyzed using SPSS Version 27 statistical data processing software. With the results of the SIPD implementation affecting the Flexibility of Financial Management of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) at the Asy Syifa Hospital, West Sumbawa Regency, the SIPD implementation simultaneously had a positive and significant effect on the dependent variable, namely Financial Management Flexibility of Regional Public Service Agencies (PPK-BLUD). From the research results, it can be concluded that the implementation of SIPD has a positive and significant effect on the financial management flexibility of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) at Asy Syifa Hospital, West Sumbawa Regency.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-04  <b>Kata kunci:</b> <i>Sistem Informasi; Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan.</i>	<p>Dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 oleh seluruh perangkat daerah tentu akan berpengaruh kepada fleksibilitas yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 untuk Badan Layanan Umum Daerah khususnya Dalam Bidang Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD ASY SYIFA Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode campuran <i>Mixed Method</i>), yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang dengan teknik pengambilan sampel non probability sampling. Model analisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana. Data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan <i>Software</i> pengolah data statistik SPSS Versi 27. Dengan hasil Penerapan SIPD berpengaruh terhadap Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat, Penerapan SIPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat.</p>

### I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan sudah seharusnya mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan

prinsip akurat, relevan, tepat waktu dan terpercaya untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah di serahkan kepada Kepala Daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri.

Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Perubahan dalam hal penatausahaan ini mengharuskan pemerintah untuk dapat terus melakukan inovasi untuk segera menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Terkait dengan pengembangan inovasi, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan. Sehingga Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebuah informasi yang berkualitas wajib melangsungkan beberapa aspek atau kriteria yang dijelaskan menurut Jogiyanto dalam buku Konsep Sistem Informasi karya Prehanto (2020:5) yaitu akurat (*accurate*), tepat waktu (*timeliness*), dan relevan (*Relevance*). SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan software masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang

dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D.

RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu OPD di Kabupaten Sumbawa Barat yang pada Tahun 2022 ini mulai mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan aplikasi lokal yaitu SIMDA (Sistem Manajemen Keuangan Daerah) akan tetapi dalam implementasinya terdapat terkendala dalam menjalankan SIPD yang berpengaruh pada fleksibilitas pengelolaan keuangan yang mendukung operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat ataukah justru mengalami penurunan dari kualitas laporan yang dihasilkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 BLUD dituntut untuk meningkatkan pelayanan, sehingga perlu adanya fleksibilitas dalam pengelolaan dananya sendiri. Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan praktek bisnis yang sehat bertujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba mengerucutkan pembahasan di dalam penelitian ini yaitu "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD ASY SYIFA Kabupaten Sumbawa Barat" dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Apa Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap fleksibilitas pada PPK-BLUD di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat?

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, yang menyajikan basis data dalam bentuk delapan kelompok data meliputi (1) Data Umum (2) Sosial Budaya; (3) Sumberdaya Alam; (4) Infrastruktur; (5) Ekonomi (6) Keuangan

Daerah; (7) Politik, Hukum dan Keamanan; (8) Insidensial

Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Sedangkan Fleksibilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam hal ini pengembangan perusahaan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan perusahaan dikatakan tidak sehat, maka keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemilik perusahaan akan sangat terbatas melihat dengan terbatasnya aktiva yang dimiliki saat ini.

Untuk Badan Layanan Umum dapat berstatus sebagai instansi pusat maupun daerah sesuai dengan kepemilikan satuan kerja yang bersangkutan. Adapun BLU yang dibentuk di tingkat daerah, itulah yang dikenal dengan nama Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat BLUD). Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengertian Badan Layanan Umum Daerah berbunyi sebagai berikut : *"Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya"*.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada satuan kerja yang dapat menjadi BLUD diantaranya merupakan SKPD atau unit kerja SKPD. Oleh karena BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada lingkungan Pemerintah Daerah maka status hukumnya tidak terpisah dari pemerintah daerah. BLUD tetap memiliki kedudukan yang sama dengan SKPD yang lain, sama-sama bertanggungjawab kepada kepala daerah, yang membedakan adalah pengelolaan keuangannya.

Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Siklus akuntansi yang dilaksanakan oleh BLUD beserta penyajian data dan informasi yang dilakukan harus sesuai dengan penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menteri Keuangan menetapkan PSAP berbasis akrual Nomor 13 pada tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015(Umum, 2015)

Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Penabulu, 2017)

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode campuran *Mixed Method*), yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi pengumpulan data, dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahap proses penelitian (Sugiyono, 2013) *Mixed Method* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa proses penelitian.

Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah urutan analisis kualitatif dan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen konsep melalui analisis data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif guna memperluas informasi yang tersedia, dan memperoleh analisis yang lebih lengkap (Sugiyono, 2013)

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Mixed Method* yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan Kuantitatif. Oleh karena itu, untuk penelitian kuantitatif menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Sedangkan Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas dan lainnya. Dalam penelitian ini data yang disajikan melalui wawancara langsung dan melalui kuisioner. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat update atau data langsung dari sumber yang diteliti yakni orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat. Metode kuantitatif digunakan untuk mencari informasi yang terukur mengenai "Pengaruh Sistem Informasi Daerah (SIPD) terhadap Penerapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy Syifa Sumbawa Barat" Sementara itu, Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai "Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Daerah (SIPD) pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Asy Syifa Sumbawa Barat".

### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pada penelitian ini, Penelitian ini dilakukan selama 30 (Tiga Puluh) hari yaitu pengumpulan data dikumpulkan mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023 dengan penyebaran quisioner kemudian mengumpulkan data berdasarkan dari quesioner (Angket) dan hasil wawancara secara langsung. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka dan diolah menggunakan analisis dengan sistem statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS V.27.

Definisi Operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y), variable dependen dalam penelitian ini adalah Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLUD. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan terkait fleksibilitas dan kemudahan dalam mengelola keuangan dengan menerapkan azas fleksibilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Variabel Independen (X), variable independent dalam penelitian ini adalah Penerapan SIPD, yaitu pernyataan professional sebagai kesimpulan terkait Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, penata usahaannya serta pelaporan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Berdasarkan hasil penelitian secara kualitatif dapat di dapatkan data bahwa :

1. SIPD adalah aplikasi berbasis web ini atau lebih dikenal dengan SIPD digunakan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya urusan kesehatan atau RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala

yang di dapatkan terutama dalam penatausahaan keuangan BLUD sehingga tentu berpengaruh terhadap fleksibilitas pengelolaan keuangannya. dan harus ada aplikasi pendamping untuk meminimalisir kesalahan

2. Supaya Pelayanan tetap berjalan tanpa terkendala terkait persediaan obat dan bahan medis habis pakai sebaiknya dalam belanja obat dan bahan medis habis pakai tidak terkendala dengan proses pengelolaan keuangan pada umumnya karena BLUD diberikan hak khusus dalam pengelolaan keuangannya agar Pelayanan RSUD Tetap berjalan dengan baik
3. Penerapan SIPD belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah karena menu yang ada di SIPD belum mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan BLUD, terutama dalam pelaporan keuangan serta penatausahaan belanja karena tidak ada fleksibilitas dalam melakukan belanja, karena bila terjadi kesalahan dalam penatausahaan akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena yang pegang kendali data base adalah pemerintah pusat bukan pemerintah daerah

#### **B. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh terhadap Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil data analisa regresi didapatkan bahwa variabel Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap *Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sedangkan hasil uji hipotesis didapatkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima dan nilai signifikansi kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Dengan melihat hasil menggunakan t tabel ( $df=20$ ) sebesar 1,725. Nilai t hitung pada pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat adalah  $2.525 > 1,725$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  Diterima artinya Terdapat pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Asy Syifa Kabupaten Sumbawa Barat

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah karena menu yang ada di SIPD belum mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan BLUD, terutama dalam pelaporan keuangan serta penatausahaan belanja karena tidak ada fleksibilitas dalam melakukan belanja, karena bila terjadi kesalahan dalam penatausahaan akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena yang pegang kendali data base adalah pemerintah pusat bukan pemerintah daerah
2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau  $2.525 > 1,725$  atau dengan signifikansi  $\alpha$  sebesar  $0,021 < 0,05$

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sehingga saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan harus memaksimalkan Menu pada SIPD agar tidak mengganggu Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Asy Syifa Sumbawa Barat sehingga penggunaan SIPD dapat maksimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera meluncurkan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD, misalnya SIPD BLUD (e-BLUD) agar memudahkan Rumah Sakit Umum Daerah se Indonesia dapat melakukan pengelolaan keuangan secara fleksibel, transparan dan akuntabel

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.  
[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BA\\_B\\_III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BA_B_III.pdf)
- Fitria, S. E., & Ariva, V. F. (2018). Analisis Faktor Kondisi Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kemampuan Berwirausaha Terhadap Kinerja Usaha Bagi Pengusaha Pidang Di Desa Cukanggenteng. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(3), 197–208.
- Kommarudin. (1999). Metodologi Penelitian. *Journal Article*, 1–24.  
[http://repository.upi.edu/63287/3/S\\_ADP\\_033273\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/63287/3/S_ADP_033273_Chapter3.pdf)
- Korry, D. I. (2017). Pengaruh Status Kerja Ibu Rumah Tangga Terhadap Coping Stress. *Repository Unika Sogijapranata*, 36–44.  
<http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14757>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Permendagri No. 79 Tahun 2018*. 1(i).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Nadiro, H. (2014). Pengaruh etos kerja Islam terhadap kualitas kerja karyawan melalui kinerja: Studi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 59.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Penabulu, Y. (2017). *Mengelola Keuangan BLUD*. 1–178. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Santosa, S., & Luthfiyyah, P. P. (2020). Pengaruh Komunikasi Pemasaran terhadap Loyalitas Pelanggan di Gamefield Hongkong Limited. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran*, 10(1), 1–7.
- Student, M. T., Kumar, R. R., Omments, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., MI, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., ... Fellowship, W. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP PEROLEHAN OPINI AUDIT BPK TAHUN 2021 DI KABUPATEN. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Sugiyono. (2016). Definisi dan Operationsl Variabel Penelitian. *Definisi Dan Operationsl Variabel Penelitian*, 44–45.
- Umum, B. L. (2015). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).
- Wawancara bersama Amril Nurman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat 2023
- Wawancara bersama Andy Suhaeri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat 2023